

**REKAPITULASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG
YANG SEDANG/AKAN DIBAHAS DI DPR-RI TAHUN 2007
(SEBANYAK 47 RUU = 21 RUU INISIATIF DPR DAN 26 RUU INISIATIF PEMERINTAH)**

| A. RUU YANG BERASAL DARI DPR (INISIATIF DPR) = 21 RUU | | | |
|--|---|--|------------------------------------|
| NO | JUDUL RUU | PERKEMBANGAN | KETERANGAN |
| 1. | RUU tentang Mata Uang | Sudah diajukan oleh Baleg untuk menjadi Inisiatif DPR | - |
| 2. | RUU tentang Kementrian Negara | Penyempurnaan Draft oleh Panitia Khusus | - |
| 3. | RUU tentang Perbankan Syariah | Dalam Penyiapan Draft Rancangan Undang-Undang oleh Komisi XI | - |
| 4. | RUU tentang Kesehatan (pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992) | Surat Presiden RI Nomor R-02/Pres/1/2007 tanggal 4 Januari 2007, menugaskan MenKes dan MenKum dan HAM mewakili Pemerintah dalam pembahasan di DPR-RI | - |
| 5. | RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi | Penyempurnaan Draft oleh Panitia Khusus | - |
| 6. | RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Ibadah Haji | Menunggu Surat Presiden untuk Pembahasan Tingkat I dengan Panitia khusus | - |
| 7. | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara | Penyempurnaan Draft di Komisi XI. | - |
| 8. | RUU tentang Kepariwisata | Dalam tahap harmonisasi di Baleg | - |
| 9. | RUU tentang Perpustakaan | Dalam tahap harmonisasi di Baleg | - |
| 10. | RUU tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera | Penyempurnaan Draft Rancangan Undang-Undang oleh Panitia Khusus | - |
| 11. | RUU tentang Pemerintahan Provinsi daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta | Penyempurnaan Draft Rancangan Undang-Undang oleh Panitia Khusus | - |
| 12. | RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum | Pembahasan Tingkat I oleh Pansus | Dep. Dalam Negeri |
| 13. | RUU tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Penyempurnaan Draft di Komisi IX | - Dep. Nakertrans - Dep. Sosial |
| 14. | RUU tentang Ombudsman Republik Indonesia | Pembahasan Tingkat 1 | Dep. Hukum dan HAM |

| NO | JUDUL RUU | PERKEMBANGAN | KETERANGAN |
|-----|---|----------------------------------|---|
| 15. | RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik | Pembahasan Tingkat I | - Dep. Kominfo - Dep. Hukum dan HAM |
| 16. | RUU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir | Pembahasan Tingkat I | - Dep. Kelautan - Dep. Hukum dan HAM |
| 17. | RUU tentang Peradilan Militer | Pembahasan Tingkat I oleh Pansus | - Dep. Hankam - Dep. Hukum dan HAM |
| 18. | RUU tentang Penanggulangan Bencana | Pembahasan Tingkat I oleh Panja | - Dep. Sosial - Pekerjaan Umum - Dep. Hukum dan HAM |
| 19. | RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang | Pembahasan Tingkat I oleh Panja | - Meneg. PP - Dep. Hukum dan HAM |
| 20. | RUU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis | Pembahasan Tingkat I oleh Pansus | Dep. Hukum dan HAM |
| 21. | RUU tentang Energi | Pembahasan Tingkat I | Menteri ESDM |

B. RUU YANG BERASAL DARI PEMERINTAH = 26 RUU

| NO | JUDUL RUU | PERKEMBANGAN | KETERANGAN |
|-----|--|---|---|
| 1. | RUU tentang Rahasia Negara | Sudah diterima DPR dari Presiden | - Dep. Pertahanan |
| 2. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Memasuki pembahasan Tingkat I, telah ada Surat Presiden | - Dep. Keuangan |
| 3. | RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara | Pembahasan Tingkat I oleh Pansus | Dep. ESDM |
| 4. | RUU tentang Ketenagalistrikan | Pembahasan Tingkat I | Dep. ESDM |
| 5. | RUU tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 | Pembahasan Tingkat I oleh Pansus | - Menteri Perencanaan dan Pembangunan |
| 6. | RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan | Pembahasan Tingkat I oleh Panja | Dep. Keuangan |
| 7. | RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan | Pembahasan Tingkat I oleh Pansus | Dep. Keuangan |
| 8. | RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah | Pembahasan Tingkat I oleh Pansus | Dep. Keuangan |
| 9. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai | Pembahasan Tingkat I oleh Pansus | Dep. Keuangan |
| 10. | RUU tentang Keimigrasian | Pembahasan Tingkat I | Dep. Kum dan HAM |
| 11. | RUU tentang Perseroan Terbatas | Pembahasan Tingkat I oleh Panja | Dep. Kum dan HAM |
| 12. | RUU tentang Narkotika | Pembahasan Tingkat I | Dep. Kum dan HAM |
| 13. | RUU tentang Lambang Palang Merah | Pembahasan Tingkat I | Dep. Kum dan HAM |
| 14. | RUU tentang Standar Pelayanan Publik | Memasuki Pembahasan Tingkat I (menunggu jadwal) | - Kementrian PAN - Dep. Kum dan HAM |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 15. | RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | Pembahasan Tingkat I oleh Pansus | - Dep. Kominfo - Dep. Kum dan HAM |
| 16. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian | Pembahasan Tingkat I oleh Panja | - Dep. Perhubungan - Dep. Kum dan HAM |
| 17. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Pembahasan Tingkat I | - Dep. Perhubungan - Dep. Kum dan HAM |
| 18. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan | Pembahasan Tingkat I | - Dep. Perhubungan - Dep. Kum dan HAM |
| 19. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran | Pembahasan Tingkat I | - Dep. Perhubungan - Dep. Kum dan HAM |
| 20. | RUU tentang Badan Hukum Pendidikan | Draft Rancangan Undang-Undang siap diajukan Pemerintah ke DPR | Dep. Pendidikan Nas. |
| 21. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang | Pembahasan Tingkat I oleh Pansus | Dep. Pekerjaan Umum |
| 22. | RUU tentang Penanaman Modal | Pembahasan Tingkat I oleh Pansus | Dep. Perdagangan |
| 23. | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi | Telah disampaikan ke Baleg oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 8 Juni 2006 No. M.UM.01.06-138 | Dep. Kum dan HAM |
| 24. | RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota | Surat Presiden RI Nomor R.01/Pres/01/2007 tanggal 2 Januari 2007, menugaskan Mendagri mewakili Pemerintah dalam pembahasan di DPR-RI. | Prioritas 2007 |
| | 1) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara. | - | - |
| | 2) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Angkola Sipirok di Provinsi Sumatera Utara. | - | - |
| | 3) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau. | - | - |
| | 4) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mandau di Provinsi Riau. | - | - |
| | 5) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur. | - | - |
| | 6) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten kota Tual di Provinsi Maluku. | - | - |
| | 7) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua. | - | - |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| | 8) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua. | - | - |
| | 9) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua. | - | - |
| | 10) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Memberamo Tengah di Provinsi Papua. | - | - |
| | 11) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua. | - | - |
| | 12) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua. | - | - |
| | 13) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat. | - | - |
| | 14) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur. | - | - |
| | 15) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten. | - | - |
| | 16) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung. | - | - |
| 25. | RUU tentang Pengesahan Undang-Undang tentang Perjanjian Ekstradisi antara Rep. Indonesia dan Rep. Korea | Telah disampaikan ke DPR RI oleh Presiden tanggal 29 September 2005. | - Dep Luar Negeri - Dep. Kum dan HAM |
| 26. | RUU Pengesahan <i>ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution</i> (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas). | Telah disampaikan ke DPR RI oleh Presiden | - Dep Luar Negeri |